

KEPRIBADIAN OTORITARIAN DAN IDEOLOGI POLITIK (STUDI KUALITATIF TERHADAP FUNGSIONARIS DAN SIMPATISAN EMPAT PARTAI POLITIK DI SURABAYA)

Akhmad Fauzie

Hawaim Machrus

Fakultas Psikologi Universitas Airlangga

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik kepribadian otoritarian dari empat ideologi politik yang ada di Indonesia: Nasionalis, Islam Tradisional, Islam Modern dan Sosial Demokrat. Subjek dalam penelitian ini adalah fungsionaris dan simpatisan dari empat partai politik: Partai Nasional Indonesia-Front Marhaenis (PNI-FM), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang berdomisili di Surabaya.

Tipe penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Variabel atau fenomena yang diamati dalam penelitian ini adalah kepribadian otoritarian dan ideologi politik. Data didapatkan melalui wawancara (interview) dengan subjek terpilih. Subjek terpilih adalah mereka yang memiliki tingkat otoritarian tinggi dari masing-masing kelompok ideologi politik. Pemilihan subjek dilakukan dengan Skala F yang diadopsi dari Skala F Adorno d.k.k. Responden penelitian ini adalah 40 orang yang berasal dari keempat kelompok ideologi politik tersebut, sedangkan subjek terpilih dari masing-masing kelompok adalah 2 orang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tipe kepribadian otoritarian kelompok nasionalis adalah paham kebangsaan yang kuat, dan menolak segala bentuk sektarian dalam ketatanegaraan, tipe kepribadian otoritarian kelompok islam tradisional adalah pola kepatuhan yang kuat terhadap pemimpin serta penolakan terhadap wacana islam sebagai dasar negara, tipe kepribadian otoritarian islam modern adalah kecenderungan yang kuat untuk menjadikan syariah islam sebagai aturan bermasyarakat dan bernegara serta menolak segala bentuk sekulerisme, dan tipe kepribadian otoritarian sosial demokrat adalah adanya kecenderungan untuk menjadikan demokrasi ala sosialis sebagai pola penataan negara.

Kata Kunci: Kepribadian Otoritarian, Ideologi Politik, Nasionalis, Islam Tradisional, Islam Modern, Sosial Demokrat

Persaingan politik (*political competition*) antar kelompok dengan ideologi politik tertentu, adalah hal yang wajar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam persaingan tersebut, setiap kelompok atau kekuatan politik berusaha menarik simpati dan dukungan sebanyak mungkin dengan mengunggulkan kelompoknya dan merendahkan kelompok lain. Hanya dengan dukungan atau perolehan suara yang besar dalam pemilihan umum (pemilu), maka kelompok atau partai politik dapat berkuasa atas kebijakan negara. Disamping itu, dengan menguasai negara, maka sebuah partai atau kekuatan politik dapat menerapkan pandangan atau ideologi politiknya bagi masyarakat. Kecenderungan untuk menguasai dan mengunggulkan kelompok sendiri, oleh Adorno (1950) disebut dengan kepribadian otoritarian (*the authoritarian personality*).

Sejarah mencatat bagaimana Orde Baru dengan kekuatan dan pandangan politiknya, berhasil membentuk rezim otoriter selama 32 tahun. Namun sejarah juga mencatat

bagaimana Orde Baru dengan ideologi fasisnya yang berpusat pada Jawanisasi dan militerisasi, penyeragaman Indonesia yang multi-kultur, multi-ras, dan multi-agama, serta sistem ekonomi konglomerasi pemonopoli perdagangan yang penuh proteksi, namun menjalankan *trickle down effect* guna memajukan perekonomiannya kelas bawah karena ketidakmampuannya untuk mandiri, mengalami kehancurannya pada tahun 1998 (Rusbiantoro, 2001).

Era reformasi lahir sebagai upaya untuk menata kembali bangsa dan negara Indonesia. Reformasi dalam bidang politik, salah satunya ditandai dengan dikembalikannya sistem kepartaian pada sistem multi-partai. Maka, pada tanggal 7 Juni 1999, dengan diikuti 48 partai politik, bangsa Indonesia menggelar pesta demokrasi pertama paska Orde Baru.

Munculnya banyak partai politik dengan berbagai macam ideologi politik, merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji. Dari berbagai ideologi politik yang ada, dapat dikelompokkan menjadi empat: nasionalis, islam (tradisional dan modern) dan sosial demokrat. Hal ini menjadi bukti bahwa pemikiran dan ideologi politik di Indonesia, sebagaimana yang dirumuskan oleh Herbeth Feith (1980), mengkristal pada empat kekuatan ideologi politik tersebut.

Lebih lanjut, dua wacana di atas, kepribadian otoritarian dan ideologi politik yang terwujud dalam partai politik, bila dijadikan tema penelitian, adalah tema yang benar-benar baru. Hal ini dikarenakan, secara teoritis dari dua disiplin yang terkait dengan tema ini, psikologi dan ilmu politik, terutama yang berkembang di Indonesia, jarang menjadikannya sebagai kajian yang mendalam. Bila ditinjau secara praktis, penelitian tentang tema ini merupakan salah satu upaya penting untuk menggali dimensi karakteristik kepribadian politik di Indonesia serta memberi fakta sosial tentang berkembangnya sikap anti demokrasi dalam sebuah masyarakat demokrasi.

Kepribadian

Kepribadian (*personality*), diantara istilah-istilah umum yang lain dalam lingkup kajian psikologi, adalah istilah yang banyak mendapat perhatian. Kata yang berasal dari bahasa Latin “*persona*”, yaitu topeng yang dipakai oleh pemain teater pada jaman Yunani Kuno ini (Hjelle & Ziegler, 1992), dalam perkembangan selanjutnya, memiliki pengertian yang luas. Namun, luasnya pengertian kepribadian, yang ditandai oleh berbagai definisi dari para ahli dengan beragam sudut pandang, bukan sebuah ranah yang tidak mengenal batas.

Walaupun terdapat beragam definisi teoritis tentang kepribadian, namun seperti yang dinyatakan oleh Hjelle dan Ziegler (1992), sebagian besar definisi mengandung unsur-unsur yang umum yaitu:

1. Menekankan arti penting individualitas atau perbedaan individu. Kepribadian menghadirkan kualitas individu yang berbeda sehingga dapat membedakan individu satu dengan yang lain. Definisi ini muncul dari hasil penelitian terhadap perbedaan kualitas atau kombinasi dari kualitas individu yang bersifat membedakan antar individu sehingga dapat memahami hakekat individu.
2. Menggambarkan kepribadian sebagai struktur atau organisasi yang bersifat hipotetik. Setidaknya, perilaku yang tampak adalah hal yang dipahami sebagai bagian dari kepribadian. Dengan kata lain, kepribadian adalah sebuah abstraksi yang didasarkan pada bukti-bukti yang didapatkan dari pengamatan perilaku.
3. Memfokuskan pada arti penting memandang kepribadian dalam kaitannya dengan sejarah kehidupan atau perspektif perkembangan. Kepribadian merupakan sebuah proses yang berkembang pada berbagai pengaruh internal dan eksternal, meliputi

sifat-sifat genetik dan biologis, pengalaman sosial dan adanya perubahan lingkungan sosial.

4. Menekankan kepribadian sebagai karakteristik atau pola perilaku yang konsisten. Kepribadian merupakan sesuatu yang bersifat stabil dan relatif abadi dalam berbagai situasi dan dari waktu ke waktu.

Otoritarian dan Kepribadian Otoritarian

Kata otoritarian merupakan istilah terjemahan dari kata *authoritarian*. Kata *authoritarian* sendiri berasal dari kata *authority* yang sebenarnya turunan dari kata Latin *auctoritas*. Kata *authority* atau *auctoritas* berarti ‘pengaruh’, ‘kuasa’, ‘wibawa’, ‘otoritas’. Dengan otoritas yang dimilikinya, seseorang dapat mempengaruhi pendapat, pemikiran, gagasan, dan perilaku orang lain, baik secara perorangan maupun kelompok. Kata lain yang terkait erat dengan otoritas adalah otoritarianisme yang berarti paham atau pendirian yang berpegang pada otoritas, kekuasaan, kewibawaan’. Hal ini meliputi pula cara hidup dan cara bertindak (Mangunhardjana, 1997).

Kajian teoritis tentang kepribadian otoritarian, menurut Stephen Frosh (1989), jarang dipaparkan secara mendalam, bahkan boleh dikatakan hilang. Hal ini, lebih lanjut menurut Frosh, karena telah terjadi kesalahbacaan sistematis (*systematic misreading*) atas kepribadian otoritarian. Wacana yang secara teoritis sangat dipengaruhi oleh teori psikoanalisa ini, dalam banyak kajian, diperkecil ruang lingkupnya hanya terbatas pada penggunaan Skala F (*F Scale*), skala yang digunakan Adorno d.k.k untuk mengukur potensi Fasisme dan kecenderungan sikap anti demokrasi (Janowitz & Marwick, 1974)

Penelitian tersebut didasarkan pada hipotesa bahwa: “*keyakinan politik, ekonomi dan sosial yang ada dalam diri individu, seringkali membentuk suatu pola yang luas dan koheren, seakan-akan membentuk mentalitas dan semangat, dan ...polanya adalah sebuah ekspresi dari kecenderungan mendalam dalam kepribadiannya*” (Adorno, dalam Shahakian, 1982). Sebagai jawaban atas hipotesa tersebut, melalui serangkaian penelitian yang dilakukan dengan Skala Anti-Semitisme (*A-S Scale*), Skala Etnosentrisme (*E Scale*), Skala Konservatisme Politik Ekonomi (*PEC Scale*) dan Skala Fasis (*F Scale*) sebagai alat ukurnya, ditemukan bahwa keyakinan politik, ideologi, ekonomi dan sosial, telah membentuk kecenderungan sikap fasistik pada individu. Pengaruh utama dari kecenderungan ini adalah, akan membentuk sikap mendukung fasistik (*profasistic*) dan sebaliknya bersikap anti demokratik.

Erich Fromm dalam bukunya *Escape From Freedom* (1997), mengartikan otoritas bukan sebagai kualitas yang dimiliki seorang pribadi dalam arti memiliki kekayaan atau kualitas-kualitas fisik. Otoritas, menurut Fromm, menunjuk pada hubungan antar-pribadi, dimana orang yang satu memandang orang lain lebih tinggi ataupun lebih rendah daripada dirinya.

Dalam banyak kajian, otoritarian adalah kata yang lebih banyak digunakan dalam dunia politik. Menurut pengertian politik, otoritarian berarti pemerintahan yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok kecil yang menuntut ketaatan mutlak dari sebagian besar atau seluruh masyarakat. Masih dalam pengertian politik, kata otoritarian seringkali disepadankan dengan kata totalitarian, otoriter, pemerintahan diktatur, atau secara praktis dikaitkan dengan Naziisme maupun Fasisme. Karena inti dari otoritarian adalah penguasaan mutlak atas seluruh anggota masyarakat serta menolak adanya proses dialogis, maka kata ini seringkali ditempatkan sebagai lawan dari demokrasi.

Tidak jauh berbeda dengan pengertian politik, otoritarian dalam pengertian psikologi diartikan sebagai orang yang bertindak laku dengan cara diktatoris dalam hubungannya dengan orang lain. Kata ini adalah kata sifat yang berkaitan dengan peranan pemimpin dalam sikap-sikap sosial (Kartono dan Gulo, 1987).

Tafsiran lain kata otoritarian dalam pengertian psikologi adalah bentuk tertentu pada kepribadian yang ditandai oleh suatu keinginan akan ketaatan dari seluruh orang yang dipandang memiliki kepribadian lebih rendah. Bentuk kepribadian ini muncul karena rendahnya toleransi terhadap sikap mendua dan tidak pasti terutama pada orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi dan terhormat.

Kurt W. Back (1977) mendefinisikan kepribadian otoritarian sebagai kepribadian yang dicirikan oleh kebutuhan yang tinggi akan kepatuhan, ketaatan dan subordinasi yang tidak diragukan; seringkali disertai dengan kepatuhan yang kuat terhadap pemimpin, memandang rendah kelemahan dan ketidaksesuaian, dan permusuhan dengan orang-orang di luar kelompok.

Kepribadian otoritarian, berdasar variabel-variabel yang digunakan dalam skala F, secara umum ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut (Sanford dan Capaldi, 1967):

1. Konvensionalisme (*Conventionalism*): ketaatan yang kuat terhadap nilai-nilai konvensional dan nilai-nilai dari kelas menengah.
2. Kepatuhan Otoritarian (*Authoritarian Submission*): sikap tunduk, patuh dan tidak kritis terhadap otoritas moral yang diidealkan bagi anggota kelompok.
3. Agresi Otoritarian (*Authoritarian Agression*): kecenderungan untuk mencela, menghina, menolak dan menghukum orang-orang yang melanggar nilai-nilai konvensional.
4. Anti Intrasepsi (*Anti-Intrasection*): menolak pemikiran subjektif, imajinatif dan lemah.
5. Ketahayulan dan Stereotipe (*Superstition and Stereotype*): percaya terhadap determinan yang bersifat mistik atas takdir manusia; kecenderungan untuk berpikir dalam kategori yang kaku.
6. Kekuasaan dan "Kekerasan" (*Power and "Toughness"*): mengkategorikan dalam batasan dua atau dimensi hal yang berlawanan, seperti kuat-lemah, pemimpin-pengikut; mengidentifikasi dengan figur yang berkuasa.
7. Pengerusakan dan Sinisme (*Destructiveness and Cynicism*): rasa permusuhan yang digeneralisir, melakukan fitnahan terhadap manusia.
8. Proyektivitas (*Projectivity*): kecenderungan untuk percaya bahwa berbagai hal yang liar dan berbahaya terjadi di dunia; proyeksi ditujukan atas dorongan emosional tak sadar.
9. Seks (*Sex*): perhatian yang lebih terhadap tindakan seksual.

Variabel tersebut dianggap secara bersama-sama membentuk suatu sindrom tunggal, suatu struktur yang kurang lebih bersifat abadi dalam diri seseorang. Struktur tersebut mendorong seseorang untuk menerima propaganda anti demokratik (Sanford & Capaldi, 1967). Tetapi, dan hal ini banyak dilakukan dalam penelitian-penelitian selanjutnya tentang kepribadian otoritarian, bahwa definisi konseptual dan operasional dari setiap variabel tersebut ditafsirkan kembali dan tidak semua variabel tersebut digunakan, terutama untuk mengetahui sifat anti demokrasi.

David O. Sears, dkk. (1991), misalnya, menyatakan bahwa kepribadian otoritarian yang menyebabkan orang bersikap anti demokrasi, secara psikologis dicirikan oleh:

1. Ketaatan kaku terhadap (dan hukuman keras bagi orang-orang yang menyimpang dari) nilai dan pola perilaku konvensional.
2. Kebutuhan yang berlebihan untuk tunduk pada, dan mengidentifikasi dengan otoritas yang lebih kuat.
3. Rasa permusuhan yang digeneralisir.
4. Pemikiran yang diwarnai oleh mistik dan tahayul.

Dengan sifat-sifat tersebut, lebih lanjut Sears menjelaskan bahwa, orang otoriter beranggapan bahwa kelompoknya adalah kelompok yang sangat hebat, sedangkan kelompok lain buruk dan memuakkan (Sears, 1991).

Dalam pembacaannya atas kepribadian otoritarian, David E. Apter (1996) menyatakan bahwa, karya Adorno d.k.k. adalah kajian orisinal yang menonjol mengenai kepribadian otoritarian. Lebih lanjut Apter berpendapat, kepribadian otoritarian adalah kepribadian yang kaku, selalu menang, dan disiplin, yang hanya mampu memberi kasih sayang yang sedikit dan bersyarat, dan ditandai oleh suatu kecenderungan menuju kepemimpinan tokoh-bapak, serta menyetujui, walaupun secara diam-diam terhadap prasangka sosial (*prejudice*).

Menurut Adorno, seperti yang dikutip oleh Apter, bahwa orang dengan kepribadian otoritarian, ketika dihadapkan pada masalah akan mencari “kambing hitam”; mereka menghendaki diperluasnya konformitas seperti militer kepada sipil; mereka dengan sengaja membatasi kebebasan pribadi dan mendukung intervensi negara dalam semua aspek kehidupan.

Maurice Duverger (1982), dalam pembacaannya atas kepribadian otoritarian menyatakan bahwa, kepribadian otoritarian didefinisikan sebagai konformitas yang sangat kuat, kepatuhan buta kepada sistem-sistem nilai tradisional, dengan tidak mempertanyakan kepatuhan kepada otoritas, oleh penglihatan yang disederhanakan tentang semesta sosial dan moral yang dibagi ke dalam kategori yang jelas (baik dan buruk, hitam dan putih, salah dan benar), dimana segala-galanya dibagi secara teliti, diatur, dan dibatasi—karena merekalah yang terbaik, yang lemah harus mendapatkan tempat di bawah karena dari segala segi mereka lebih rendah, dan nilai orang ditentukan hanya oleh kriteria luar, yang didasarkan pada kondisi sosial.

Mengutip pendapat dari Alfred Adler, lebih lanjut Duverger berpendapat bahwa, kecenderungan otoritarianisme adalah suatu unsur fundamental dalam jiwa manusia. Menurut Adler, sebagaimana yang dikutip Duverger, bahwa naluri untuk menguasai adalah sumber utama perilaku manusia, yang menggantikan libido—naluri kesenangan—dalam konsep Freudian (Duverger, 1982).

Analisa Psikologis atas Otoritarian

Dalam bukunya *Escape From Freedom* (1947/1997), Erich Fromm dengan sudut pandang psikoanalisa, membahas Fasisme dan makna kebebasan dalam sistem otoriter dan sistem demokrasi. Berawal dari kajian atas masyarakat modern, yaitu suatu masyarakat yang menurut Fromm ditandai oleh keinginan individu untuk lari dari kebebasan, maka ditegaskan oleh Fromm bahwa diperlukan adanya mekanisme untuk melarikan diri. Mekanisme tersebut, lebih lanjut Fromm menjelaskan, meliputi otoritarianisme, kedestruktifan dan penyesuaian diri secara otomatis.

Otoritarianisme ditandai oleh dua kecenderungan psikologis. *Pertama* adalah kecenderungan untuk menghilangkan kemandirian diri seseorang sendiri, *kedua*, kecenderungan seseorang untuk menguasai orang lain di luar dirinya agar mendapat kekuatan yang dirasa kurang dari dirinya. Maka, bentuk nyata dari mekanisme ini adalah usaha untuk tunduk dan menguasai (Fromm, 1997).

Sikap tunduk atau yang disebut oleh Fromm sebagai masokistis, adalah perasaan rendah diri, inferior, tidak berdaya dan tidak berarti. Orang-orang yang mengalami kondisi ini, ditandai oleh kecenderungan untuk tidak menegakkan dirinya sendiri, tidak mengerjakan apa yang mereka inginkan, tetapi justru tunduk pada perintah-perintah yang dikatakan oleh kekuatan luar.

Sebaliknya, sikap menguasai atau yang disebut oleh Fromm sebagai sadistik, ditandai oleh tiga kecenderungan. *Pertama* adalah kecenderungan untuk membuat orang lain tergantung pada dirinya sendiri dan menanamkan kekuasaan mutlak dan tidak terbatas terhadap orang lain, sehingga mereka menjadi sekedar alat. *Kedua* adalah kecenderungan

untuk, disamping mengatur orang lain dengan cara absolut, juga memeras, memanfaatkan orang lain. Dan *ketiga* adalah kecenderungan untuk membuat orang lain menderita atau melihat mereka sengsara. Bentuk penderitaan yang diinginkan, bukan hanya fisik, tetapi juga mental.

Dari dua kecenderungan tersebut, Fromm menjelaskan bahwa, kecenderungan sadistis dalam wujud sosialnya, seringkali dirasionalisasikan ketimbang kecenderungan masokistis, antara lain dengan berbagai bentuk perhatian terhadap orang lain atau cara-cara persuasif lainnya. Bentuk rasionalisasi yang paling sering dilakukan, Fromm memberi contoh, adalah: “*Saya menguasai anda karena saya tahu apa yang terbaik untuk anda, dan dengan keinginan anda sendiri, anda harus mengikuti saya tanpa melawan*”.

Pandangan Fromm tentang sadistis tersebut, sangat dipengaruhi oleh pandangan-pandangan sebelumnya, salah satunya adalah Thomas Hobbes. Dalam *Leviathan* (1651), seperti yang dikutip oleh Fromm, Hobbes menganggap sadisme sebagai kecenderungan umum umat manusia. Hasrat tersebut mendorong manusia untuk selalu ingin berkuasa, dan mencapai titik akhir pada kematian. Lebih lanjut Hobbes berpendapat bahwa, hasrat untuk berkuasa bukan merupakan sifat yang kejam, tetapi merupakan akibat paling rasional dari hasrat manusia untuk kenikmatan dan keamanan.

Tetapi, pada sosok Frederich Nietzsche-lah (1844-1900), pandangan filosofis-psikologis tentang hasrat atau kehendak untuk berkuasa (*will to power*), dipandang mencapai titik yang sempurna. Menurut Nietzsche, dalam tiga bukunya: *Beyond God and Evil*, *The Genealogy of Morals* dan *The Will to Power*, kehendak untuk berkuasa adalah hakekat dunia, hakekat hidup dan hakekat terdalam dari ada (*being*). Singkatnya, kehendak untuk berkuasa adalah hakekat dari dunia, hidup dan ada. Kehendak untuk berkuasa adalah hakekat dari segala-galanya (Sunardi, 1996).

Kehendak untuk berkuasa adalah akibat langsung dari hakekat hidup manusia. Nietzsche mendefinisikan hidup sebagai sejumlah kekuatan yang disatukan oleh suatu proses-pemeliharaan. Hidup merupakan suatu bentuk yang mengakhiri proses-proses kekuatan sebelumnya, yang berusaha saling berkuasa, menonjolkan diri dan saling melawan (Sunardi, 1996). Inti dari pandangan Nietzsche tentang hidup, seperti yang dikutip oleh St. Sunardi dari buku *The Will to Power*, adalah:

“sejumlah kekuatan, yang disatukan oleh proses-pemeliharaan umum, kita sebut hidup. Yang termasuk dalam proses-pemeliharaan umum ini—sebagai sarana yang membuat hidup itu mungkin—adalah semua yang disebut perasaan. Ide, pikiran; yaitu (1) penolakan terhadap semua kekuatan lain, (2) penyesuaian semua (kekuatan) yang sama sesuai dengan bentuk dan ritme, (3) pertimbangan berhubungan dengan penyatuan atau pemindahan”. (dikutip dari Sunardi, 1996: 48)

Walaupun jarang disebut dalam kajian teoritis psikologi, pandangan Nietzsche tentang hidup, manusia dan kehendak untuk berkuasa, dapat dikatakan mengandung nilai-nilai psikologis. Hal tersebut dapat dilihat, terutama dalam pandangan Nietzsche bahwa manusia akan merasa dirinya benar-benar hidup, apabila manusia merasakan pergolakan kehendak untuk berkuasa. Akibatnya, untuk mencapai kekuasaan, maka manusia harus mengatasi segala hambatan yang ada. Tetapi, hal yang lebih penting adalah bagaimana manusia mampu mempertahankan kekuasaannya, dan prinsip otoritarian adalah pilar utamanya.

Pergolakan tersebut terjadi dalam ruang-ruang psikologis manusia, yang berakibat munculnya perilaku untuk berkuasa. Bila tujuan hidup adalah kebahagiaan, maka menurut Nietzsche, hal tersebut dapat dipenuhi dengan perasaan akan bertambahnya kekuasaan. Dengan kata lain, kebahagiaan manusia dapat dicapai apabila segala hambatan untuk berkuasa, dan juga upaya untuk merebut kekuasaan darinya, dapat diatasi. Tujuan hidup untuk menjadi

lebih berkuasa, dan bukan kedamaian, melainkan perang, digambarkan oleh Nietzsche dalam tulisannya:

“percayalah padaku: rahasia untuk memetik buah paling besar dan kenikmatan tertinggi manusia adalah hidup dengan bahaya! Dirikanlah kota-kotamu di lereng gunung Vesuvius. Kirimkanlah kapal-kapalmu ke samudera yang belum dipetakan! Hiduplah dalam perang melawan sesamamu dan dirimu sendiri!”

(dikutip dari Sunardi, 1996)

Pandangan Nietzsche bahwa hidup didominasi oleh dorongan-dorongan untuk bertindak agresif, walaupun kurang ada bukti yang jelas, memiliki kesamaan dengan pandangan Freud tentang Thanatos. Thanatos atau insting mati bersifat merusak. Menurut Bapak Psikoanalisa ini, dalam sebuah fatwanya yang terkenal, bahwa “tujuan semua kehidupan adalah kematian” (Hall & Lindzey, 1993). Salah satu bentuk turunan dari insting-insting mati adalah dorongan destruktif. Dorongan tersebut menjadi sebab utama munculnya keagresifan, yaitu pengrusakan diri yang diarahkan ke objek-objek substitusi.

Dalam kajian psikologi politik berperspektif psikoanalisa, karena sifat utamanya yang cenderung merusak, maka thanatos atau insting mati dipandang sebagai sumber bagi sifat-sifat otoritarian, sedangkan eros atau insting hidup adalah sumber bagi sifat-sifat demokratis (Duverger, 1997).

Lebih lanjut, pengejawantahan sifat-sifat otoritarian dalam perilaku, terutama dalam komunikasi, orang otoritarian dipandang memiliki ciri-ciri tertentu. Dalam komunikasi, orang berpendirian otoritarian hanya mengenal satu macam komunikasi, yaitu satu arah. Sebaliknya, komunikasi dua arah, saling diskusi dan menanggapi, dan model demokratis dengan segala kemungkinan perbedaan dan pertentangan pendapat, secara konseptual mungkin dipahami, tetapi sulit untuk dihayati (Mangunhardjana, 1997).

Ideologi Politik

Dari bentuk katanya, ideologi politik (*Political Ideology*) merupakan gabungan dari dua buah kata, dimana masing-masing kata memiliki definisi konseptual yang mandiri, yaitu ideologi dan politik. Tetapi, dalam penggunaannya, ideologi politik seringkali tidak diartikan secara terpisah. Kedua kata tersebut, walaupun memiliki definisi konseptual masing-masing, dipandang sebagai kesatuan kata yang melahirkan definisi baru.

Istilah ideologi dimasukkan ke dalam khazanah bahasa ilmu-ilmu sosial oleh S.L.C. Destutt de Tracy (1754-1836), seorang politisi dan filsof pada awal abad sembilanbelas (Baradat, 1988; Suseno, 1992). Kata ideologi, pada awalnya berarti ilmu tentang ide (*science of ideas*), yaitu studi tentang asal mula, evolusi dan sifat dasar dari ide. Dari kata ini, diturunkan sebuah kata yaitu *ideologues*, yang berarti orang-orang yang berjuang untuk melahirkan ide-ide, dalam hal ini gagasan-gagasan progresif seperti hak asasi manusia atau negara konstitusional (Suseno, 1992).

Secara umum, ideologi dipandang sebagai seperangkat keyakinan yang berorientasi pada tingkah laku (*an action-oriented set of belief*). Sistem pemikiran yang didasarkan atas ideologi, akan menghasilkan perbuatan. Hal ini memunculkan sebuah logika yaitu, bahwa dengan mengamati perbuatan seseorang, maka dapat diketahui apa ideologinya. Dengan kata lain, bilamana keyakinan-keyakinan tersebut tidak mampu memaksakan perbuatan, maka itu bukan ideologi (Daniel Dhakidae, *Prisma* No.1, Januari 1982 Tahun XI, LP3ES).

Francois Houtart (dalam M. Sastrapartedja, *Prisma* No.1, Januari 1982 Tahun XI, LP3ES) berpendapat bahwa, ideologi juga dapat dimengerti sebagai suatu sistem penjelasan tentang eksistensi suatu kelompok sosial, sejarah dan proyeksinya ke masa depan dan

merasionalisasikan suatu bentuk hubungan kekuasaan. Hal yang terkandung dalam ideologi: *pertama*, ideologi memuat sejarah masa lampau yang diukur menurut sistem nilai yang dicita-citakan; *kedua*, suatu visi mengenai masa depan sebagai hasil penilaian sejarah masa lampau dan nilai yang dicita-citakan itu; *ketiga*, mengarah pada suatu tindakan atau praksis (F. Houtart, dalam Y.B. Sudarmanto, *Majalah Filsafat Driyarkara* Tahun. XIII No.2 1986).

Hal lain yang terkandung dalam ideologi politik adalah, bahwa ideologi politik memiliki dua fungsi: individual dan sosial. Fungsi individual, seperti yang diungkapkan oleh Paul Ricoer (dalam M. Sastrapartedja, *Prisma* No.1, Januari 1982 Tahun XI, LP3ES), bahwa ideologi politik berfungsi untuk “memolakan, mengkonsolidasi, menciptakan tertib dalam arus tindakan manusia”. Hal ini memiliki hubungan yang erat dengan ideologi sebagai pembentuk identitas sosial (*social identity*) dan tipe kepribadian.

Secara sosial, fungsi dari ideologi politik mendapat berbagai tafsiran. Fungsi dari ideologi politik sendiri telah menjadi salah satu tema kajian utama dalam psikologi politik. McGuire (1993), seperti yang dikutip oleh Maritza Montero (1997, dalam Fox dan Priletsky, 1997) menyatakan bahwa, di Amerika Serikat, ideologi lebih diartikan sebagai sistem keyakinan. Di bagian dunia lain (Amerika Latin dan Eropa), ideologi dipahami sebagai hegemoni atau dominansi dari gagasan-gagasan tertentu terhadap gagasan lain. Sedang dalam wilayah yang telah dipengaruhi oleh pemikiran Marx, ideologi dipahami sebagai kesadaran palsu (*false consciousness*).

Secara umum, Reo M. Christenson dalam kata pengantar buku *Ideologies and Modern Politic* (1972) berpendapat bahwa ideologi politik berfungsi sebagai:

1. Sebagai sistem keyakinan politis, ideologi yang memberikan suatu struktur kognitif
2. Memberikan suatu formula yang bersifat menentukan—suatu arahan bagi individu dan tindakan serta pertimbangan kolektif.
3. Sebagai alat untuk mengatasi dan mengintegrasikan konflik.
4. Mengetahui identifikasi diri (*self-identification*) seseorang.
5. Untuk mengetahui kekuatan dinamis dalam kehidupan individu dan kolektif, memberikan suatu pengertian mengenai misi dan tujuan, serta suatu komitmen hingga tindakan yang dihasilkan.

Pendapat lain tentang fungsi ideologi politik dikemukakan oleh Roy C. Macridis dalam bukunya *Contemporary Political Ideologies, Movement and Regime* (1989) yaitu:

1. Ideologi politik sebagai alat legitimasi
2. Ideologi politik sebagai alat solidaritas dan mobilisasi
3. Ideologi politik sebagai alat ekspresi
4. Ideologi politik sebagai alat kritik dan utopia
5. Ideologi politik sebagai ideologi dan tindakan politik

Dari sudut pandang psikologi, sebagaimana pendapat Erich Fromm, bahwa ideologi lahir karena manusia didorong untuk mencari superioritas, kekuasaan, status, dan kemenangan dalam arena politik, terutama melalui ideologi dan gerakan otoritarian. Dorongan tersebut muncul sebagai akibat dari perasaan rendah diri, tidak aman, tidak mumpuni, kesendirian, penghinaan dan pengkerdilan

METODE PENELITIAN

Subjek Penelitian

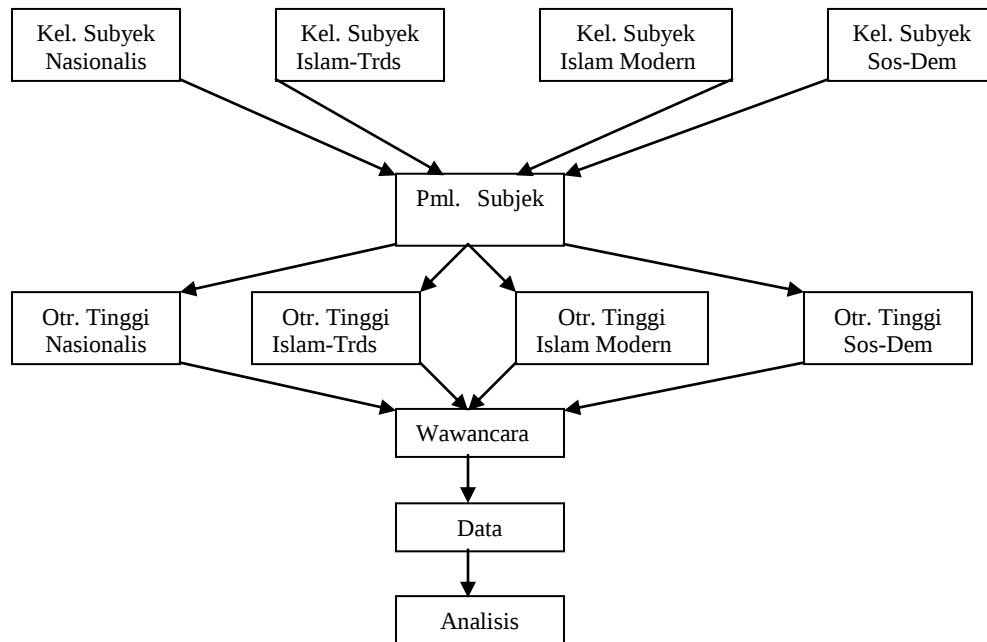
Subjek dalam penelitian ini adalah fungsionaris atau pengurus tingkat propinsi dan kotamadya dan simpatisan dari empat partai politik: PNI-Front Marhaen, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Rakyat Demokratik (PRD) dengan

ciri-ciri sebagai berikut: (1) bertempat tinggal di Surabaya, (2) berusia 25 tahun dan (3) memiliki tingkat otoritarian tinggi berdasar pengukuran dengan Skala F.

Desain Penelitian

Untuk menunjukkan langkah-langkah dalam penelitian ini, maka penelitian didesain sebagai berikut:

Gambar 1
Desain Penelitian



Keterangan:

Pml : Pemilihan

Otr : Otoritarian

Trds : Tradisional

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) dengan subyek penelitian yang terpilih. Wawancara digunakan sebagai metode pengambilan data karena melalui metode ini, peneliti akan bisa memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang diteliti (Banister, d.k.k dalam Poerwandari, 1997). Jenis wawancara yang akan digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, berfokus dan terbuka.

Wawancara tidak terstruktur dipilih karena sifatnya yang luwes sehingga susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pada saat wawancara, termasuk karakteristik sosial-budaya responden (Mulyana, 2001). Adapun yang dimaksud berfokus dalam penelitian ini, karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara mengacu pada indikator-indikator dalam Skala F.

Wawancara terbuka dipilih karena memungkinkan responden menggunakan cara-caranya sendiri untuk menanggapi permasalahan yang diajukan serta memungkinkan

responden membicarakan isu-isu penting yang tidak terjadwal (Denzin, 1970 dalam Mulyana, 2001; Silverman, 1993)

Metode Analisis Data

Data yang diperoleh melalui wawancara tersebut, akan dianalisis dengan metode analisis wacana (*discourse analysis*). Analisis wacana dipilih sebagai metode analisa data karena penelitian ini berfokus pada bahasa dalam konteks sosialnya (Brown dan Yule, 1993; van Dijk, dalam Potter dan Wetherell, 1987). Sebagai penelitian dalam konteks psikologi sosial, maka analisa wacana yang ditekankan dalam penelitian ini berbeda dengan analisa wacana yang umum digunakan dalam analisa media. Sebagaimana yang dirumuskan oleh Potter dan Wetherell (1987), analisis wacana dalam penelitian psikologi sosial tidak berfokus pada (a) hubungan antara wacana dan kognisi (b) permasalahan linguistik

tetapi lebih menekankan pada makna sosial (*social meaning*) dari rangkaian kata yang digunakan oleh responden dalam menanggapi suatu permasalahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Islam Tradisional

Dari data yang diperoleh melalui wawancara dengan subjek terpilih kelompok Islam Tradisional (PKB), maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik kepribadian otoritariannya adalah:

- ❖ Kebangsaan, nasionalis dan sekuler, adalah tata kehidupan yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia
- ❖ Kepatuhan rakyat terhadap pemimpin adalah syarat bagi kemajuan masyarakat.
- ❖ Orang yang paham agama, atau dalam tradisi Islam Tradisional disebut kyai, adalah orang yang harus menjadi pemimpin.
- ❖ Dalam politik empiris, ada kecenderungan yang kuat untuk mempertahankan pola kenegaraan dengan dasar Pancasila, sehingga ada kecenderungan untuk menghambat perkembangan wacana Islam *kaffah* dari kelompok berazaskan Islam

Islam Modern

Ideologi politik yang menjadikan Islam sebagai azas partai ini, melalui serangkaian data yang diperoleh, memiliki karakteristik kepribadian otoritarian sebagai berikut:

- ❖ Menjadikan ajaran Islam sebagai dasar pembenar segala pemikiran dan tindakan politik.
- ❖ Ada keyakinan yang kuat bahwa mereka telah melaksanakan Islam secara menyeluruh atau *kaffah*.
- ❖ Memandang rendah segala bentuk pemikiran yang memisahkan antara ajaran agama dengan tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- ❖ Adanya kecenderungan pandangan yang kuat bahwa figur atau sosok pemimpin yang ideal, adalah mereka yang berasal dari kelompok Islam Modern.
- ❖ Dalam politik empiris, upaya politik mereka menuju pada penerapan syariah Islam dan menolak segala yang bersifat sekulerisme.

Nasionalis

Dari pandangan-pandangan yang diungkapkan oleh subjek terpilih kelompok nasionalis, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik kepribadian otoritarian nasionalis adalah:

- ❖ Ada kecenderungan pandangan yang kuat bahwa hanya kelompok Nasionalis-lah yang peduli dengan nasib *wong cilik*.
- ❖ Ada kecenderungan pandangan yang kuat bahwa orang-orang Nasionalis adalah orang-orang yang berjuang demi tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa.
- ❖ Ada pandangan yang kuat, bahwa antara agama dan negara, adalah entitas yang berbeda dan tidak dapat disatukan. Dalam politik empiris, mereka mendukung dan mempertahankan sekulerisme.
- ❖ Ada kecenderungan untuk mengkultuskan pemimpin, sehingga akan membentuk pola kepatuhan yang buta terhadap pemimpin.
- ❖ Ada kecenderungan untuk menata masyarakat dan negara dalam pola sentralistik atau terpusat. Hal ini merupakan pengaruh dari pandangan sosialis sebagai salah satu unsur pembentuk Marhaenisme.

Sosial Demokrat

Dalam pandangan umum, kelompok sosial demokrat yang dalam politik praktis di Indonesia diwakili oleh Partai Rakyat Demokratik, dipandang memiliki kedekatan atau bahkan sama dengan kelompok komunis. Dari hasil wawancara dengan subjek terpilih kelompok sosial demokrat, dapat disimpulkan bahwa karakteristik kepribadian otoritariannya adalah:

- ❖ Ada kecenderungan yang kuat memandang rendah pemikiran politik kelompok lain.
- ❖ Ada keyakinan yang kuat bahwa merekalah kelompok yang benar-benar memperjuangkan nasib orang-orang yang tertindas, terutama kaum buruh.
- ❖ Ada kecenderungan penolakan yang kuat terhadap segala bentuk kerjasama dengan kelompok politik lainnya, terutama kelompok yang berkuasa.
- ❖ Ada kecenderungan yang kuat untuk menjadi kekuatan politik kritis-radikal, sehingga menjadikan kelompok ini sebagai oposan.
- ❖ Ada kecenderungan untuk menolak pengaruh agama dalam masyarakat dan juga negara.

Mengkaji tema kepribadian otoritarian dalam konteks politik saat ini, bukan sebuah upaya yang mudah. Hal ini dikarenakan belum adanya kekuatan politik tunggal (*single majority*) sebagaimana yang ditunjukkan oleh Orde Baru selama 32 tahun. Namun, sebagaimana yang dihipotesakan oleh Adorno (1950), bahwa kepribadian otoritarian merupakan potensi psikologis yang ada dalam setiap pribadi dan juga kelompok, terutama yang memiliki pandangan atau keyakinan tertentu. Potensi tersebut akan berkembang dan mewujudkan menjadi tindakan praktis-otoriter, apabila ada kesempatan untuk menjadi kekuatan tunggal.

Dari data penelitian, baik data kualitatif maupun kuantitatif yang diperoleh dari skor otoritarian, dapat digambarkan adanya dinamika interaksi karakteristik kepribadian otoritarian antar ideologi politik. Dari penghitungan dengan teknik ANOVA, dapat disimpulkan bahwa, dengan nilai mean otoritarian 21,78, kelompok Islam Modern (PBB) memiliki tingkat otoritarian paling tinggi. Hal ini didasarkan pada perbandingan dengan nilai mean otoritarian total yaitu 14,85.

Kelompok Islam Tradisional, dengan nilai mean otoritarian 15,23, dapat dikatakan memiliki tingkat otoritarian cukup tinggi. Nilai mean otoritarian dua kelompok lainnya, Sosial Demokrat dan Nasionalis, masing-masing sebesar 10,38 dan 11,70, berada dibawah nilai mean otoritarian total. Hal ini dapat menjadi dasar untuk mengatakan bahwa, tingkat otoritarian kedua kelompok tersebut lebih rendah daripada dua kelompok lainnya.

Tingginya tingkat otoritarian kelompok Islam Modern, disebabkan adanya keyakinan yang kuat bahwa pandangan dan ideologi politiknya selalu benar karena didasarkan pada ajaran Islam. Maka, penegakan syariat Islam bagi tata kehidupan negara, adalah bagian dari perjuangan suci. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh kedua subjek terpilih dari kelompok ini:

“...bagaimana mencapai **Islam secara kaffah**, sehingga kalau belum terjadi Islam secara kaffah, kalau kita sesama Islam, kita harus saling mengingatkan...namun kalau berbeda keyakinan, artinya kita harus menjaganya, selama mereka tidak mengganggu urusan kita...kalau mereka mendahului memerangi kita, kita tidak harus berdiam diri...”

“...kaffah sesuai ajaran Al Qur'an, adalah **secara menyeluruh kita melaksanakan Islam**, dalam masyarakat, keluarga, dan juga bernegara, maka kita akan ajak masyarakat supaya mau ke arah itu...”

Pandangan politik ini, tentu saja bertentangan dengan pandangan politik dari kelompok Nasionalis, Islam Tradisional dan juga Sosial Demokrat.

“... ideologi yang cocok adalah yang wajar-wajar saja...ya kayak, *balance* lah, antara Islam, bukan Islam modern dengan tradisional, **Islam dengan nasionalis itu saja**...masalahnya Indonesia bukan negara Islam, dan tidak murni nasionalis juga kan...”(Islam Tradisional)

“...tapi kalau dijadikan negara Islam, ya tidak akan setuju...” (Nasionalis)

“...banyak sekali dari saudara-saudara kita yang menuntut dimasukkannya Piagam Jakarta ke dalam UUD...ya jelas ngak bisa...**ini suatu contoh pemaksaan kehendak**...” (Nasionalis)

“...kalau negara kita, mau dibuat suatu unsur atau aliran...yo ngak bisa...kenapa...Indonesia itu khan Binneka Tunggal Ika...lalu bagaimana...**harus NASA, nasionalis-agama, harus ada perpaduan**...” (Nasionalis)

“...agama adalah urusan pribadi, dan negara adalah urusan umum. Keduanya tidak bisa digabungkan, **negara ya diurus dengan tata kenegaraan...agama diurus dengan ajaran agama**...(Sosial Demokrat)

Dinamika lain yang adapt digambarkan adalah adanya kesamaan pandangan antara ketiga kelompok ideologi politik: Nasionalis, Islam Tradisional dan Sosial Demokrat. Kesamaan pandangan politik ketiga kelompok tersebut adalah pada penegakan demokrasi dan sekulerisme.

“...di sini masyarakat agamis yang tidak beragama, PKB sendiri ingin menarik **kaum abangan**...” (Islam Tradisional)

“...sesungguhnya **sosial-demokrat** itu pas dengan kita, dan PKB bergaul dengan mereka, karena tidak ada yang salah dengan mereka...dan lebih berani mengedepankan demokratnya, lebih berani mengikis kemungkaran...kalau dilihat dari *platform*-nya, nampaknya **sejalan dengan kita**...” (Islam Tradisional)

“...kalau negara kita, mau dibuat suatu unsur atau aliran...yo ngak bisa...kenapa...Indonesia itu khan Binneka Tunggal Ika...lalu bagaimana...**harus NASA, nasionalis-agama, harus ada perpaduan...**” (Nasionalis)

“...ya saya katakan tadi, biarpun 90 % orang Indonesia itu Islam, namun kalau dikatakan syariat Islam itu harus masuk, sangat sukar...**karena kita nasio...Indonesia itu nasional...**” (Nasionalis)

“...masih jauh dari apa yang dicita-citakan, terutama oleh kelompok pro-demokrasi...kenyataannya, masih ada kelompok yang memandang anak-anak PRD sebagai komunis...**ada kelompok yang memaksakan kehendaknya tanpa memperhatikan kondisi dan realitas yang ada...**” (Sosial Demokrat)

Gambaran tersebut mendapat penguatan bukti dari hasil olahan dalam *Homogeneous Subset*, dimana pada subset 1, ditempati oleh Sosial Demokrat, Nasionalis dan Islam Tradisional. Hal ini menandakan bahwa perbedaan diantara ketiga kelompok ideologi politik tersebut, tidak benar-benar nyata. Pada subset 2 juga terdapat tiga kelompok, Nasionalis, Islam Tradisional dan Islam Modern. Berkumpulnya ketiga kelompok tersebut pada subset 2, mengindikasikan bahwa perbedaan diantara ketiganya tidak benar-benar nyata. Hal ini dapat digambarkan bahwa kelompok Islam Modern masih dapat menjalin hubungan politik dengan kelompok Nasionalis dan Islam Tradisional, karena kedua kelompok tersebut, masih memiliki pandangan yang didasarkan pada agama.

“...ideologi itu harus menerima ideologi lain yang dia punya...tapi di Indonesia, ideologi **harus pakai agama**, kalau tidak pakai agama, ya koyo komunis iku...” (Islam Tradisional)

“...pendidikan politik secara masyarakat adalah **akhlakul karimah dari para pemimpinnya...**(Islam Tradisional)

“...kalau negara kita, mau dibuat suatu unsur atau aliran...yo ngak bisa...kenapa...Indonesia itu khan Binneka Tunggal Ika...lalu bagaimana...**harus NASA, nasionalis-agama, harus ada perpaduan...**” (Nasionalis)

“... **yang baik itu NASA, nasional dan agama...**” (Nasionalis)

Gambaran di atas juga mengindikasikan bahwa, pertentangan atau perbedaan karakteristik kepribadian otoritarian yang benar-benar nyata, adalah antara kelompok Sosial Demokrat dengan Islam Modern. Hal ini dibuktikan pada hasil olahan *Tukey Test* dan *Bonferroni Test*, dimana antara Islam Modern (PBB) dengan Sosial Demokrat (PRD), diperoleh nilai probabilitas 0,039, sedangkan antara Sosial Demokrat dengan Islam Modern, juga diperoleh nilai probabilitas 0,039.

DAFTAR PUSTAKA

- Apter, D. E. (1996). *Pengantar Analisa Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Back, K. W. (1977). *Social Psychology*. New York: John Wiley dan Sons Inc.
- Duverger, M. (1982). *Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Feith, H., & Castle, L. (ed). (1988). *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta: LP3ES.
- Fromm, E. (1997). *Lari Dari Kebebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gulo, D., & Kartono, K. (1987). *Kamus Psikologi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Mangunhardjana, A. (1997). *Isme-Isme dari A sampai Z*. Kanisius, Yogyakarta.
- Mischel, W. (1971). *Introduction to Personality*. New York: Harcourt Brace Jovanovich College Publisher.
- Poerwandari, E. K. (1998). *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*. Jakarta: Lembaga Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3), Fakultas Psikologi UI.
- Potter, J., & Wetherrel, M. (1987). *Discourse and Social Psychology Beyond Attitude and Behavior*. London: Sage Publication.
- Rusbiantoro, D. (2001). *Bahasa Dekonstruksi ala Foucault dan Derrida*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sanford, F. H., & Capaldi, E. J., (ed), (1967). *Advancing Psychological Science, Volume Three, Research in Developmental, Personality, and Social Psychology*. New Delhi: Prentice-Hall of India Private Limited.
- Sears, D. O. (1991). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Penerbit Erlangga